



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

# APBD DKI 2023 Fokus Atasi Banjir, Macet dan Dampak Resesi

## ■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI Jakarta 2023 dalam rapat paripurna pada Selasa (29/11). Pada 2023, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 83,78 triliun untuk tiga isu prioritas, yakni pengendalian banjir, kemacetan, danantisipasi dampak resesi ekonomi. "Fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen dari APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BP-

KD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata di Jakarta, Selasa.

Kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur antisipasi banjir, seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, serta pengadaan pompa dan pintu air. Selain itu, kegiatan operasional dan pasca-bencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, hingga pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan, program penanganan kemacetan di antaranya melalui pembangunan infrastruktur mengurai kemacetan, seperti proyek MRT, LRT, dan lainnya serta kegiatan opera-

sional seperti penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, hingga pelayanan angkutan bus sekolah.

Kegiatan prioritas untuk antisipasi dampak resesi ekonomi antara lain untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, dan pariwisata.

Alokasi RAPBD 2023 lainnya, yakni sebesar 21,09 persen untuk belanja pendidikan, kemudian standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen.

Selain itu, Rancangan APBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain, layanan dasar perkotaan, seperti penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan akses hunian layak. Selanjutnya, terkait penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ekosistem pesisir. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial serta pelayanan publik.

## Implementasi anggaran

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, setelah raperda selesai diparipurnakan, rancangan APBD itu akan diserahkan kepada Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Berdasarkan penilaian akhir, total APBD DKI Jakarta 2023 naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 senilai Rp 82,5 triliun.

Di lokasi yang sama, Heru Budi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penyelesaian Raperda 2023 oleh DPRD DKI. Menurut dia, jajaran eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar, dan rekomendasi para anggota dewan yang disampaikan selama proses pembahasan hingga persetujuan peraturan daerah.

Dia berharap, dengan adanya persetujuan dewan atas APBD DKI 2023, eksekutif dan legislatif bisa terus mengoptimalkan berbagai program kerja strategis. "Izinkan eksekutif kembali menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan," ujar dia. ■ antara ed: nur aini